

## **DAMPAK DINASTI POLITIK TERHADAP DEMOKRASI LOKAL: KEKUASAAN POLITIK KELUARGA RATU ATUT DI PROVINSI BANTEN**

Alifah Jasmine Kallista Remanu<sup>1</sup>, Najwa Adhwa Ramadhani<sup>2</sup>, Tias Rahma Dewi<sup>3</sup>, Ahren Jasmine Azzahra<sup>4</sup>, Ridwan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Email: [2310413061@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413061@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik politik dinasti dijalankan oleh keluarga Ratu Atut, serta dampaknya terhadap demokrasi lokal di Provinsi Banten. Dinasti politik merupakan praktik kekuasaan yang dijalankan oleh elite politik yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan serta berlangsung selama beberapa tahun untuk menduduki jabatan-jabatan strategis guna mempertahankan kekuasaan didalam suatu wilayah. Dalam kasus keluarga Ratu Atut di Banten, mereka membangun jaringan kekuasaan yang kuat melalui kepemimpinannya di Banten selama beberapa periode dan menempati posisi-posisi yang strategis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dianggap relevan untuk memahami secara mendalam praktik dinasti politik Ratu Atut dan keluarganya sehingga dapat memengaruhi demokrasi lokal di Banten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinasti politik dapat berpengaruh terhadap demokrasi tingkat lokal. Dinasti politik yang dilakukan keluarga Ratu Atut menyimpang dari prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Praktik ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang berpotensi merugikan masyarakat Provinsi Banten. Selain itu, praktik ini juga berdampak pada terbatasnya kontestasi politik yang adil dan terbuka, menghambat partisipasi politik, melemahkan akuntabilitas, serta mendorong pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan keluarga. Konsentrasi kekuasaan inilah yang pada akhirnya membuka ruang untuk mereka melakukan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan hal ini, diperlukan peran pemerintah lokal untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar lebih peduli terhadap rekam jejak dan kompetensi dari calon pada pemilihan umum serta peningkatan regulasi khusus untuk membatasi praktik politik dinasti untuk menciptakan ruang yang adil, transparan, dan aspiratif bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Demokrasi Lokal, Dinasti Politik, Ratu Atut

### **Abstract**

*This study aims to analyze how the Ratu Atut family practices political dynasty and its impact on local democracy in Banten Province. Political dynasty is a practice of power exercised by political elites who are related by blood or marriage and who hold strategic positions for several years in order to maintain power within a region. In the case of the Ratu Atut family in Banten, they built a strong power network through their leadership in Banten over several terms and occupied strategic positions. This study uses a qualitative method with a case study approach. The researcher used qualitative methods because they were considered relevant to deeply understand the political dynasty practices of Ratu Atut and her family, which could influence local democracy in Banten. The results of this study indicate that political dynasties can influence local democracy. The political dynasty practiced by Ratu Atut's family deviates from the principles of democracy, which should be the main foundation for the implementation of decentralization. This practice has caused significant negative impacts on natural resources, potentially harming the people of Banten Province. Additionally, this*

*practice has limited fair and open political competition, hindered political participation, weakened accountability, and encouraged decision-making that favors family interests. This concentration of power ultimately creates opportunities for corruption and abuse of power. Therefore, it is essential for local governments to enhance political education among the public to foster greater awareness of candidates' track records and competencies during elections, as well as to strengthen regulations to curb dynastic political practices, thereby creating a fair, transparent, and aspirational space for the community.*

**Keywords:** *Local Democracy, Political Dynasty, Ratu Atut*

## **A. Pendahuluan**

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang di mana masyarakat baik langsung dan tidak langsung dapat mengikuti proses penentuan kebijakan politik. Untuk dapat melihat sistem politik yang berdasarkan asas demokrasi, diperlukan sistem politik yang konstitusional guna mengukur sistem politik demokrasi tersebut. Dalam artikel yang berjudul “Pendalaman Arah Demokrasi Lokal” yang ditulis oleh Indra J. Piliang menyebutkan bahwa arah demokrasi nasional justru kian menyusut dan busuk. Menurut Indra, demokrasi dapat kian menyusut karena adanya faktor campur tangan dari aktor politik (Wahyudi, 2009). Di era desentralisasi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa demokrasi lokal jauh lebih bersih, efektif, dan aspiratif dibandingkan demokrasi pusat, sebab politisi dan elit lokal masih cenderung bersifat tradisional, otoriter, dan mendominasi sehingga mereka tidak terbiasa dengan proses demokratisasi dan keterbukaan informasi. Realitas yang terlihat dalam politik lokal mencerminkan bahwa model demokrasi yang dipraktikkan kerap menjadi isu yang konservatif. Dalam isu konservatif yang sedang ramai, sangat sulit untuk menciptakan pemimpin yang mengerti asas demokrasi di masyarakat dalam sistem transisi ini (Maate, 2018). Dalam hal ini, politik lokal yang mengalami dinamika kerap terjadi dalam bentuk oligarki politik sehingga sistem pemerintahan demokrasi tidak lagi efektif dan lebih mengarah kepada totaliter.

Dinamika politik lokal seringkali terjadi yang digunakan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Beberapa hal diantaranya yang merupakan fenomena penerusan kekuasaan kepada anggota keluarga yang disebut dinasti politik bukanlah hal yang baru dalam politik lokal. Secara harfiah, dinasti politik merupakan strategi yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang “kekal” dengan jaringan keluarga (Effendi, 2018). Dalam hal ini, fenomena dinasti politik adalah hal yang memang sudah ada sejak Indonesia masih menganut sistem kerajaan. Dinasti politik berakar pada sejarah feodalisme dan kerajaan, di mana zaman tersebut, kekuasaan dimiliki oleh nenek moyang dan selalu diwariskan kepada sanak keluarga (Maulidhea, 2023). Dengan adanya sejarah feodalisme yang mengakar, hal ini yang membentuk pemerintahan Indonesia yang terus dijadikan kebiasaan yang terus-menerus untuk mempertahankan dan meneruskan kekuasaan. Dengan menempatkan keluarga mereka pada jabatan publik yang strategis akan memberikan kemudahan bagi para

elit politik agar dapat mengontrol dan mengendalikan kebijakan publik yang menjadi kepentingan mereka (Leo dalam Fitri, 2019). Menurut Mietzner (2009), politik dinasti cenderung memperkuat politik kontemporer di Indonesia. Dalam hal ini, fenomena dinasti politik dapat mencemari nama demokrasi bagi Indonesia karena ada sistem *check and balances* yang justru melemah dan hilang. Mekanisme *check and balance* yang seharusnya menjadi alat untuk mengontrol pemerintah malah dihancurkan dengan adanya pelanggaran dinasti politik.

Dalam era kontemporer, dinasti politik dikenal dengan para elit politik yang mempunyai ikatan kekeluargaan, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan sehingga kerap disebut sebagai oligarki politik (Nurhadi, 2020). Dinasti politik juga disebut sebagai segelintir elit yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (Mietzner dalam Nurhadi, 2020). Dalam penelitiannya Agustino (2014) menyebutkan fenomena dinasti politik mempengaruhi stabilitas sosial politik dan ekonomi di Indonesia, karena masyarakat tidak mempunyai ruang akses yang lebih leluasa akibat monopoli penguasa dan sanak keluarganya. Selain itu, Zuhro (2011) dalam penelitiannya juga menunjukkan praktik politik dinasti telah menghasilkan pemimpin yang kualitasnya buruk dan demokrasi yang diterapkan justru akan lebih mengembangkan mekanisme dinasti politik. Penelitian lainnya, Bardhan dan Mokherjee (2005) menyebutkan 3 ancaman dari dinasti politik yang diantaranya dinasti politik dapat melanggengkan kasus korupsi karena kekuasaan digunakan untuk kepentingan elit politik. Selain itu, tidak efisiennya alokasi anggaran juga menjadi ancaman karena kerap digunakan dan ditujukan para kelompok elit. Dinasti politik juga dapat menghasilkan kelembagaan daerah yang tidak efisien dan tidak sehat terhadap perkembangan demokrasi.

Pembahasan dinasti politik memang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten yang sudah ditentukan dan didesain sedemikian rupa agar setiap anggota keluarga yang mengikuti kontestasi pemilu akan berhasil meraih hal tersebut. Dalam hal ini, saat Atut ditetapkan tersangka kasus korupsi, masih banyak masyarakat yang mendukungnya (Maulidhea, 2023). Hal ini menunjukkan seberapa kuat dan mengguritanya kekuasaan keluarga Atut di Banten yang telah diatur untuk meraih kemenangan baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif (Maulidhea, 2023). Dalam hal ini, mulai dari suami, anak, hingga ipar Ratu Atut mendominasi dalam sistem pemerintahan di Provinsi Banten. Menurut data yang didapatkan dalam penelitian Sukri (2020) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat banten hanya sebanyak kurang dari 65 persen pada setiap Pilkada. Dengan keterlibatan masyarakat yang minim di Banten, hal ini menjadi salah satu faktor bagaimana keluarga Atut melanggengkan dinasti politiknya di Banten. Hal ini juga menunjukkan bahwa dinasti politik keluarga Atut merupakan gambaran negatif dari otonomi daerah yang membajak demokrasi (*hijacked democracy*) oleh hubungan geneologis yang ada berdasarkan kekeluargaan maupun diluar hubungan geneologis yang mempunyai kepentingan dalam menduduki jabatan publik (Effendi, 2018). Dalam hal ini, dinasti politik

yang dilakukan keluarga Atut di Banten adalah hal yang menarik untuk dikaji. Beberapa orang menganggap dinasti politik terbagi atas dua hal, yakni wajar secara alami dan tidak wajar karena terdapat distorsi terhadap demokrasi (Effendi, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan dampak dari dinasti politik yang dianggap dapat membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan referensi artikel dengan judul “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah” yang ditulis oleh Agus Sutisna pada tahun 2017. Artikel ini menjadi salah satu sumber utama yang kami gunakan di dalam penelitian ini. Tujuan Sutisna menulis artikel ini untuk dapat mengetahui serta menjelaskan terkait dengan bagaimana praktik politik dinasti yang dijalankan Ratu Atut selama masa kepemimpinannya di Banten berlangsung, yang cenderung menunjukkan proliferasi di berbagai arena masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang diterapkan melalui proses wawancara, triangulasi, dan studi pustaka. Melalui penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa praktik politik dinasti yang terjadi pada era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah di Banten menunjukkan adanya tanda-tanda persebaran pada ranah kekuasaan di tingkat eksekutif dan legislatif. Selain itu, praktik politik dinasti yang terjadi juga menyebar ke arena kehidupan masyarakat, seperti bisnis, sosial-budaya, pendidikan, dan keormasan. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada praktik politik dinasti yang dilakukan oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah penelitian kami berfokus pada dampak yang diberikan dari adanya praktik politik dinasti yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah terhadap kualitas demokrasi lokal dan juga menganalisis lebih mendalam terkait dengan praktik politik dinasti yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah beserta keluarganya. Selain itu, penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis lebih dalam terkait akan hal ini dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari artikel dan *website* resmi yang relevan.

Kemudian, di dalam penelitian ini kami juga menggunakan referensi artikel dengan judul “Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat” yang ditulis oleh Mhd. Al Fahjri Sukri pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penyebab langgengnya dinasti politik yang dilakukan oleh keluarga Atut di Provinsi Banten. Pada penelitian ini, peneliti mengadopsi metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan keberhasilan dinasti politik yang dibangun keluarga Atut untuk mempertahankan kekuasaan tidak hanya didasarkan pada akar dinasti politik yang kuat, melainkan juga digunakannya strategi politik “*Octopussy Dynasty*” yang telah dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang telah ada sejak Chasan Sohib, ayah Ratu Atut menjabat. Pada penelitian ini, Sukri berfokus meneliti bagaimana keluarga Ratu Atut dapat mempertahankan politik dinasti mereka di Banten. Hal

ini berbeda dengan fokus pada penelitian kami, dimana kamu berfokus pada analisis untuk dapat melihat bagaimana politik dinasti Ratu Atut dapat memberikan pengaruh terhadap demokrasi lokal. Selain itu, di dalam penelitian yang akan dilakukan, kami berfokus untuk menganalisis bentuk praktek dari politik dinasti yang dilakukan oleh Ratu Atut beserta keluarganya. Di dalam penelitian kami, penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengupas tuntas terkait akan topik penelitian kami. Data yang didapatkan berdasarkan dari data sekunder yang kami dapatkan melalui dokumen online yang akurat, seperti artikel dan *website* resmi yang membahas permasalahan ini.

Selanjutnya, di dalam penelitian ini, kami juga menggunakan referensi lain dengan judul “Dinasti Politik dan Demokrasi di Aras Lokal” yang ditulis oleh Nur Quma Laila dan Hasse Jubba pada tahun 2023. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dampak yang diberikan dari adanya eksistensi dinasti politik di Banten. Dalam menulis artikel ini, Laila dan Jubba menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dalam pengumpulan datanya berasal dari studi pustaka atau data sekunder yang berasal dari sumber tulisan yang relevan dengan topik ini. Dalam menganalisis penelitian, teknik yang digunakan adalah deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang ada secara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik politik dinasti dapat dilakukan dengan berbagai strategi yang dimulai dari penempatan kekuasaan secara paksa, pencitraan dan segmentasi untuk menarik pemilih hingga menempatkan kerabat ke dalam berbagai posisi pemerintahan dan bisnis. Dalam hal ini, politik dinasti bukan hanya memberikan dampak negatif kepada partisipasi politik, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi yang rendah di Banten. Pada penelitian ini Laila dan Juba memfokuskan penelitian terhadap strategi yang digunakan dalam praktik dinasti politik di banten dan juga dampaknya dalam kualitas demokrasi di banten. Berbeda dengan penelitian kami, penelitian yang kami susun bertujuan untuk menganalisis praktik dinasti politik apa saja yang dilakukan Ratu Atut Chosiyah di Banten dan keluarganya serta dampak yang diberikan terhadap demokrasi lokal.

Fenomena politik dinasti berhasil menarik perhatian banyak akademisi dan studi. Hal ini terjadi karena fenomena politik dinasti dinilai merupakan sebuah permasalahan yang mampu merusak prinsip meritokrasi, menghambat adanya regenerasi kepemimpinan, dan juga melemahkan transparansi serta akuntabilitas publik. Pada konteks kasus Provinsi Banten, fenomena dinasti politik yang terjadi pada keluarga Ratu Atut Chosiyah menjadi salah satu contoh yang paling menonjol. Pasalnya, praktik penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga Atut ini telah bertahan selama lebih dari satu dekade dan justru semakin menguat meskipun beberapa anggotanya terjerat kasus korupsi. Lebih dari itu, keluarga Atut juga membangun kekuasaan yang mencakup jabatan eksekutif, legislatif, hingga sektor sosial dan bisnis. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, fenomena ini telah diulas dari berbagai sisi, seperti menyorot tentang kekuasaan keluarga Atut di dalam ranah masyarakat, strategi politik dan familisme keluarga Atut sebagai faktor utama dalam cara mereka

mempertahankan dinasti, dan juga bahkan menekankan dampak politik dinasti terhadap kualitas demokrasi di Banten.

Berbeda dari fokus-fokus penelitian tersebut, pada penelitian ini peneliti mengajukan kontribusi secara sintesis yang komprehensif, sekaligus juga melakukan analisis mendalam terkait dengan pengaruh yang diberikan dari praktik dinasti politik keluarga Ratu Atut secara spesifik mampu mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Selain itu, penelitian ini juga berfokus untuk mengkaji dampak dari dinasti politik terhadap berbagai dimensi demokrasi meliputi partisipasi warga, representasi politik, dan juga efektivitas pengawasan publik. Dalam hal ini, pendekatan tematik yang digunakan akan memberikan peluang kepada peneliti untuk melakukan identifikasi pola relasi kekuasaan yang lebih luas, termasuk terkait dengan bagaimana politik dinasti mampu menciptakan adanya ketimpangan secara struktural di dalam kontestasi politik lokal. Dengan demikian, pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memberikan kontribusi secara teoritis dan empiris untuk dapat memberikan wawasan baru terkait dengan hubungan antara politik dinasti dan demokrasi lokal. Fokus penelitian dirumuskan melalui dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana praktik dinasti politik dijalankan oleh keluarga Ratu Atut di Provinsi Banten? dan (2) Bagaimana dampak dari praktik tersebut terhadap kualitas demokrasi lokal di Banten?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Menurut Schensul (2011), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam karakteristik perilaku individu, kehidupan sosial serta struktur dan dinamika organisasi (Safarudin dkk, 2023). Pada penelitian ini, peneliti memilih metode kualitatif karena dianggap paling relevan dengan tujuannya yakni untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik dinasti politik Ratu Atut Chosiyah mempengaruhi demokrasi lokal di Provinsi Banten. Sementara itu, pendekatan studi kasus di adopsi oleh peneliti karena memungkinkan peneliti untuk mengupas permasalahan dinasti politik yang dilakukan Ratu Atut secara mendalam dengan fokus terhadap bagaimana dampaknya terhadap demokrasi lokal. Menurut Yin (2014), studi kasus merupakan pendekatan yang sesuai untuk mengkaji fenomena kontemporer, terutama ketika batas antara fenomena yang ingin diteliti dengan konteks sosialnya tidak sepenuhnya jelas (Pradita dkk, 2025). Dengan studi kasus juga peneliti dapat mengkaji suatu fenomena secara intensif dan mendalam, sehingga memungkinkan untuk tercapainya pemahaman yang luas terhadap fenomena serupa. Dalam penelitian ini, kasus dinasti politik Ratu Atut Chosiyah dipilih untuk dianalisis secara mendalam guna melihat dampaknya bagi demokrasi lokal, yang diharapkan nantinya dapat bisa merepresentasikan dinamika serupa dalam kasus politik dinasti di wilayah lokal lainnya.

Sumber data pada penelitian ini bersifat sekunder. data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung bersumber dari subjek maupun objek penelitian, melainkan data-data yang dikumpulkan melalui sumber sumber yang telah ada sebelumnya (Sari & Zefri, 2019). Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan literatur terdahulu dalam bentuk literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan, dan laman media massa untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan kasus Ratu Atut Chosiyah, politik dinasti, demokrasi lokal, serta pemerintahan daerah Kota Banten.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, sebagai teknik utama dalam menganalisis data sekunder yang diperoleh. Peneliti memilih analisis tematik karena dengan teknik ini dapat memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan dan menafsirkan tema-tema dalam data kualitatif, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena politik yang kompleks (Braun & Clarke, 2006).

Namun, pada proses penelitian ini terdapat keterbatasan metodologis pada penggunaan datanya. Data yang digunakan hanya bersumber dari data sekunder, tanpa adanya data primer seperti wawancara dengan aktor lokal dan masyarakat Banten maupun pengamat politik. Hal ini tentu saja membatasi kedalaman analisis terhadap bagaimana persepsi dan pengalaman langsung dari berbagai pihak yang terdampak oleh praktik dinasti politik Ratu Atut di Banten tersebut. Adanya keterbatasan tersebut cenderung membuat penelitian ini bersifat sintesis daripada penelitian orisinal. Meskipun demikian, data sekunder yang digunakan oleh peneliti tetap memiliki relevansi dan validitas yang kuat dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai sumber literasi terpercaya yang digunakan peneliti seperti artikel jurnal, dokumen resmi pemerintahan, serta laporan media kredibel, yang membantu peneliti mengkaji fenomena praktik dinasti politik secara mendalam serta mengidentifikasi dampaknya terhadap demokrasi lokal secara komprehensif.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Praktik Dinasti Politik Ratu Atut di Provinsi Banten**

Kekuasaan formal dinasti politik di Indonesia umumnya dibangun dengan adanya relasi paternalistik dengan redistribusi program-program populis, yang disalurkan melalui berbagai mekanisme seperti politik 'gentong babi' maupun praktik politisasi anggaran. Hal ini yang merupakan strategi mereka untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan melakukan pendekatan antara rakyat dan pemerintah sehingga pemerintah dapat membentuk opini dan politik persuasif mereka melalui politisasi uang dalam konteks lokal (Effendi, 2018). Dalam hal ini, dinasti politik pada ranah lokal biasanya meromantisasi dengan membesarkan familisme untuk menjamin praktik ini untuk dapat menjamin kelangsungan eksistensinya secara berkelanjutan. Melihat familisme dalam politik lokal, dapat dibentuk melalui tiga cara yaitu figur, klientelisme, dan tribalisme yang menjadi pokok kunci dalam pembentukan basis familisme dalam politik lokal yang ada di Indonesia (Allen dalam Effendi, 2018). Proses ini

sangat berpengaruh dalam pemerintahan lokal untuk membentuk dinasti politik dengan dilakukan melalui dua jenis yaitu *by design* dan *by accident*. Dinasti politik dengan jenis *by design* biasanya sudah dilakukan dan terbentuk sejak lama sehingga memang basis familisme dalam pemerintahan sudah kuat relasinya. Dalam jenis ini juga mereka cenderung sudah menempatkan kerabat mereka dalam posisi strategis dalam jabatan tertentu. Jenis kedua yaitu *by accident*, artinya terjadi dalam situasi pemerintahan yang secara tiba-tiba untuk menggantikan jabatannya dengan kerabatnya demi menjaga kekuasaan informal semata. Pola ini biasanya dilakukan untuk menghalangi calon lain maju dalam proses pengajuan kandidat sehingga dijadikan sebagai platform politik untuk mengamankan kekuasaan daerah (Effendi, 2018).

Budaya politik familisme yang ada dalam dinasti politik lokal dapat ditelusuri dengan pemetaan sumber kekuasaannya. Pemetaan menjadi sebuah hal krusial dalam membentuk karakteristik politik dinasti yang berbeda dalam setiap jabatan politik. Dalam hal ini, terdapat empat tipologi yang mendominasi untuk membentuk pemerintahan dinasti yang diantaranya yaitu familisme berbasis populisme, tribalisme, jejaring kekuasaan informal, dan feodalisme (Effendi, 2018). Dalam dinamika kekuasaan yang ada di Banten, menggunakan bentuk pemerintahan yang cenderung pada dinasti politik dengan basis jaringan kuasa. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa dinasti politik yang ada di Banten dibentuk untuk menjadi dasar bagi koalisi klan politik, memonopoli ekonomi, melakukan kekerasan, dan lainnya sehingga mengakar kuat dari masa ke masa. Dalam hal ini, dinasti politik di Banten menggunakan rancangan *by design*, yang berarti secara sengaja para kerabat dari pejabat akan selalu mengisi jabatan yang kosong demi mempertahankan kekuasaan mereka di Banten (Effendi, 2018). Patron yang dibangun sudah berdiri tegak bersamaan dengan usia Banten sehingga sudah menjadi budaya yang terus dilestarikan.

Awal dinasti politik Ratu Atut di Provinsi Banten berakar dari pengaruh dan kekuatan politik yang dibangun oleh ayahnya, Tubagus Chasan Sohib, sejak masa Orde Baru. Chasan Sohib dikenal sebagai tokoh lokal yang sangat berpengaruh dan menjadi "jawara" di Banten, yang dipelihara oleh rezim Orde Baru untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Golkar guna menyaingi basis massa kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang didukung ulama. Chasan Sohib berhasil membangun jaringan kekuasaan yang luas, yang dikenal dengan model "*Octopus Dynasty*" atau dinasti gurita, di mana keluarga dan kroni-kroninya menempati berbagai posisi strategis di bidang politik, bisnis, sosial, budaya, hingga organisasi keagamaan di Banten (Sutisna, 2017).

Pada awal tahun 2000-an, setelah Banten resmi berdiri sebagai Provinsi sendiri dan terpisah dari Provinsi Jawa Barat, pengaruh politik keluarga Chasan semakin menguat. Ratu Atut Chosiyah mulai menapaki karier politiknya dengan dukungan penuh dari jaringan jawara dan ulama yang selama ini menjadi pilar kekuatan ayahnya. Pada Pilkada Banten kedua yang digelar secara langsung pada 2006, Ratu Atut terpilih sebagai Gubernur Banten, menandai awal dominasi dinasti politik keluarganya di provinsi tersebut. Selama hampir dua

periode menjabat gubernur, Ratu Atut dan keluarganya menguasai berbagai posisi eksekutif dan legislatif, serta memperluas pengaruhnya ke ranah non-politik seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan organisasi sosial budaya (Rivan, 2024). Dinasti politik Ratu Atut bertahan kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kasus korupsi yang menjeratnya pada 2013. Faktor utama yang mendukung kelanggengan dinasti ini adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat Banten, mendapatkan legitimasi secara tradisional yang didapatkan dari sekelompok jawara dan para ulama, serta dukungan dari struktur partai Golkar yang mendominasi. Model dinasti ini menggambarkan bagaimana kekuasaan politik keluarga Ratu Atut merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Banten, menciptakan jaringan patronase yang kompleks dan sulit ditembus oleh kekuatan politik lain.

**Tabel 1. Dominasi Dinasti Politik Provinsi Banten Era Kepemimpinan Gubernur Banten Ratu Atut Periode 2006-2013**

No	Nama	Hubungan Keluarga	Jabatan	Periode
1.	Hikmat Tomet	Suami	DPR	2009 - 2014
2.	Andika Hazrumy	Anak Pertama	DPD	2009 - 2014
			DPR	2014 - 2016
			Wakil Gubernur Banten	2017 - 2022
3.	Andira Aprilia Hikmat	Anak Kedua	DPD	2019 - 2024
4.	Ade Rossi Khaerunnisa	Menantu	DPRD Kota Serang	2009 - 2014
			DPR	2019 - 2024
5.	Tanto W. Arban	Menantu	Wakil Bupati Pandeglang	2015 - 2020
6.	Ratu Tatu Chasanah	Adik Kandung	DPRD Banten	2010 - 2015
			Bupati Serang	2015 - 2020
7.	Tubagus Haerul Jaman	Adik Tiri	Wakil Wali Kota Serang	2008 - 2011

			Wali Kota Serang	2011 - 2018
			DPR	2019 - 2024
8.	Ratu Ria Maryana	Adik Tiri	DPRD Kota Serang	2019 - 2024
9.	Ratna Komalasari	Ibu Tiri	DPRD Kota Serang	2009 - 2014
10.	Heryani	Ibu Tiri	Wakil Bupati Pandeglang	2010 - 2015
11.	Airin Rachmi Diany	Adik Ipar	Wali Kota Tangerang Selatan	2011 - 2021

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Dinasti politik Ratu Atut Choisyah di Provinsi Banten muncul sebagai bentuk penguasaan kekuasaan yang diwariskan dalam lingkup keluarga. Ratu Atut menjabat sebagai Gubernur Banten dari 2007 hingga 2012, dan keluarganya menduduki berbagai posisi strategis, menciptakan jaringan kekuasaan yang solid (Effendy, 2018). Praktik dinasti politik ini mengakibatkan stagnasi dalam demokratisasi. Keluarga Atut mendorong anggota keluarga untuk mengisi posisi penting, sehingga menghambat munculnya calon pemimpin berkualitas. Selain itu, dinasti ini menciptakan ketidakadilan dalam akses kekuasaan, di mana masyarakat memiliki peluang yang kecil untuk dapat ikut serta dalam kegiatan politik. Praktik dinasti ini berdampak besar pada demokrasi lokal. Keluarga Atut lebih mengutamakan kerabat dalam posisi publik, yang menghambat munculnya calon pemimpin baru yang berkualitas. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam akses kekuasaan, yang dalam hal ini, masyarakat memiliki kesempatan yang terbatas untuk ikut serta dalam sebuah proses politik. Selain itu, dinasti politik sering kali melahirkan praktik korupsi dan kolusi, di mana keputusan politik cenderung menguntungkan keluarga daripada kepentingan publik, menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Keluarga Atut memanfaatkan hubungan kekerabatan dan patronase untuk memperkuat posisi mereka, mirip dengan fenomena "Cendanasasi" yang terjadi selama era Soeharto. Ini menggambarkan bagaimana dinasti politik dapat merusak dinamika demokrasi lokal dengan mengendalikan posisi-posisi strategis.

Menggali lebih mendalam terkait dinasti politik yang dibangun keluarga Atut sudah tercantum dalam berbagai referensi. Sutisna (2017) menekankan berkembangnya dinasti politik keluarga Atut di Banten adalah masih kuatnya peran dan aktor lokal yang berpengaruh itu sendiri dari ayah kandung Atut yakni Tubagus Chasan Sohib, yang memang sudah

berhasil mempertahankan dinasti politik ini sejak dahulu, di mana berhasil menjadikan Ratu Atut sebagai gubernur Banten selama dua periode (Sukri, 2020). Sejak Atut menjabat menjadi gubernur Banten, penyebaran politik dinasti keluarganya semakin masif, mulai dari ranah eksekutif, legislatif, bahkan sampai kepada ormas, pendidikan, sosial-budaya, dan bisnis masyarakat Banten. Dalam artikel lainnya yang ditulis Handoko (2018) juga menjelaskan pengaruh dinasti politik di Banten berdampak terhadap sumber daya alam (SDA) seperti masifnya eksploitasi, pembangunan yang direncanakan tidak berjalan, pencemaran lingkungan sampai kegiatan yang diadakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhambat untuk edukasi lingkungan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa dinasti politik yang ada di Banten kerap merugikan seluruh aspek mulai dari sumber daya alam (SDA) maupun pembangunan juga tata kelola pemerintahan yang seharusnya dapat dilakukan dengan maksimal tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Selain itu memang pada tahun 1967, Chasan Sohib mendirikan PT. Ciomas Raya, yang merupakan perusahaan besar di Banten yang berfokus pada konstruksi jalan dan bangunan fisik dalam bidangnya. Perusahaan ini juga bergerak dan bekerja sama dengan berbagai organisasi yakni Kamar Dagang dan Industri Daerah Banten, Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia Banten, juga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Indonesia Banten sehingga Chasan Sohib dapat memiliki akses yang luas dalam bidang ekonomi dan politik (Irawan dalam Sukri, 2020). Dengan adanya intervensi dan peran yang kuat dari Chasan Sohib kemudian membuat dinasti politik yang ada di Banten semakin berkembang, ditambah dengan diangkatnya Atut sebagai Gubernur Banten pada saat itu dan berhasil menempatkan keluarganya dalam posisi yang strategis dalam pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Mereka juga menguasai organisasi yang ada di Banten seperti Relawan Banten Bersatu pada 2007 dan PPPSBB yang menjadi kuda tunggangan dalam kemenangan keluarga Atut di Banten (Taher dalam Sukri, 2020).

### **Dampak Dinasti Politik Ratu Atut Terhadap Demokrasi Lokal**

Pada hakikatnya, politik dinasti dipandang sebagai praktik yang memiliki dampak dua sisi. Di satu sisi, politik dinasti dipandang sebagai praktik yang berpotensi menyingkirkan hak politik individu lain dengan cara-cara yang menyimpang dari ajaran demokrasi serta hak asasi manusia yang telah dipelajari. Namun, disisi lainnya, lapangan kepada seseorang yang memiliki hak secara konstitusional untuk dapat dipilih dengan alasan hubungan kekerabatan dengan pejabat sebelumnya, juga merupakan bagian dari pelanggaran terhadap hak politik yang sah sehingga bertentangan dengan asas demokrasi itu sendiri (Gadafi & Nelwati, 2024). Dalam sebuah pemilihan kepala daerah di tingkat lokal, fenomena politik dinasti merupakan hal yang seringkali ditemukan, meskipun telah dipilih secara langsung melalui sistem demokrasi, namun peranan dinasti dalam politik tetap berjalan. Tentu saja fenomena ini memengaruhi bagaimana proses politik yang seharusnya berjalan demokratis, justru menjadi tidak demokratis karena disebabkan oleh adanya intervensi dari berbagai pihak yang

memiliki wewenang dalam menjalankan kekuasaan, memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap finansial juga infrastruktur politik yang kuat. Menurut Hidayati (2014), demokrasi dan kepentingan umum merupakan landasan politik yang diterapkan di Indonesia, sehingga apabila melanggengkan politik dinasti akan mencederai prinsip demokrasi tersebut. Hal tersebut karena pada dasarnya politik dinasti merupakan praktik yang berfokus terhadap kepentingan segelintir kelompok dan pribadi untuk mereproduksi kekuasaan dari sebuah keluarga tertentu dan jauh dari kepentingan masyarakat luas (Gadafi & Nelwati, 2024).

Fenomena politik dinasti di Indonesia telah tumbuh dan menguat sejak lama yakni sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001. Kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk memperluas partisipasi politik masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, justru membuka celah untuk praktik politik dinasti (Pradita dkk, 2025). Menurut Dr. Sarjana Sigit Wahyudi, M. Hum (2009), tujuan dari desentralisasi adalah untuk mendorong proses demokratisasi di tingkat lokal, oleh karena itu dalam implementasinya pun harus diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Menurutnya, dalam praktik pelaksanaan desentralisasi di Indonesia kerap kali menyimpang dari prinsip demokrasi yang seharusnya diusung. Ironisnya adalah proses demokratisasi di tingkat lokal menghadapi hambatan yang justru disebabkan oleh aktor-aktor lokalnya sendiri yang seharusnya menjadi pelaksana utama desentralisasi. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kekuasaan pribadi dan kelompoknya melalui praktik-praktik seperti politik dinasti. Kasus Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten menjadi salah satu simbol praktik politik dinasti yang menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak didistribusikan secara meritokrasi, melainkan diwariskan secara turun-temurun dalam satu lingkaran keluarga. Tentu saja hal ini bertentangan dengan tujuan desentralisasi yang sebenarnya.

Dinasti politik Ratu Atut ini menggerus prinsip meritokrasi, di mana seharusnya posisi-posisi strategis kekuasaan ditempati oleh individu yang layak berdasarkan kemampuan, prestasi, dan integritas. Namun dengan adanya praktik dinasti politik ini, posisi strategis tersebut ditempati oleh individu berdasarkan hubungan kekeluargaan. Hal tersebut menghambat calon-calon pemimpin yang potensial, kompeten, dan memiliki visi misi yang lebih baik (FH Esa Unggul, 2024). Selanjutnya, dengan praktik ini, kualitas keterwakilan menjadi sangat rendah karena tidak berdasarkan proses seleksi yang kompetitif dan akuntabel. Praktik ini menciptakan konsentrasi kekuasaan hanya pada keluarga tertentu saja, di mana berdampak pada demokrasi lokal yang melibatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan (BPMBKM, 2023). Dengan keberadaan dinasti politik, proses pengambilan keputusan dan arah kebijakan cenderung berpihak pada kepentingan keluarga penguasa yang bertujuan untuk memperkuat posisi politik dan ekonomi keluarga, serta bukan untuk kepentingan warga lokalnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwasanya warga setempat hanya diposisikan sebagai objek pasif dalam politik lokal, karena tidak memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi maupun terwakili secara substantif. Kondisi seperti ini tentu dapat memberikan kerusakan terhadap nilai demokrasi yang mengutamakan partisipasi

dan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses yang adil dan bebas (Gadafi & Nelwati, 2024).

Kehadiran keluarga Ratu Atut di berbagai posisi strategis, yang membentuk struktur politik dinasti dengan tujuan menguasai pemerintahan secara sistemik. Hal ini menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan serta mengaburkan batas antara kepentingan publik dan pribadi. Politik dinasti ini juga menjadi salah satu penyebab lahirnya praktik korupsi di pemerintahan lokal (BPMBKM, 2023). Dinasti ratu Atut ini membuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan anggaran yang dilakukan DPRD Banten menjadi tidak efektif. DPRD Banten tidak mampu menjalankan fungsi *check and balance* nya sebagai lembaga legislatif karena banyak anggotanya yang berafiliasi secara politik atau personal dengan dinasti tersebut. Berdasarkan Laporan Tahunan ICW pada 2012, dijelaskan terkait praktik korupsi yang dilakukan Ratu Atut tercermin dalam APBD Provinsi Banten, di mana Atut terjerat kasus pengadaan alat kesehatan di Banten. Vonis pengadilan membuktikan lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa tersebut telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan keluarganya. Tindakan korupsi tersebut dipicu oleh gaya hidup mewah Ratu Atut serta didorong oleh posisi strategisnya sebagai Gubernur Banten. Dalam tindakannya ini, Ratu Atut juga didukung oleh dinasti politiknya yang berada di berbagai posisi strategis lainnya sehingga ia memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut (Christiawan, 2016).

Melihat fakta lainnya di lapangan, justru dinasti politik berkembang dan cenderung menyebar dalam lingkup negara demokrasi di Indonesia. Sistem politik dinasti justru cenderung mementingkan kedekatan personal, bukan menurut kapasitas dan kualitas dari para calon pemimpin. Hal ini tentunya dapat mencemari perkembangan keberlangsungan perpolitikan Indonesia di masa depan, karena dapat memotong hak masyarakat luas untuk dapat melahirkan pemimpin yang baru, melainkan melahirkan pemimpin nir kompetensi dan melahirkan praktik neo-tirani (Heriyanto, 2022). Hal ini juga karena partai politik memprioritaskan popularitas dan kekayaan daripada eksekutif yang terampil. Posisi ini juga didasarkan oleh rekrutmen partai yang tertutup sehingga kandidat pemenang dapat dilihat dalam kategori popularitas dan kekayaan. Dalam hal ini, dinasti politik juga tidak hanya merugikan dalam sisi politik, juga dapat merugikan dalam sisi ekonomi lantaran mengganggu persaingan bisnis yang sehat. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik dengan keluarga juga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Hal ini dikarenakan dinasti politik tidak memberi ruang kepada orang yang lebih mampu untuk bergabung dalam pemerintahan, juga siklus kekuasaan hanya berputar dalam segelintir elit dan pengusaha setempat (Heriyanto, 2022). Menurut perspektif sebagian orang menganggapnya hal yang wajar, namun sebagian lainnya menganggap hal tersebut sebagai distorsi atau tekanan terhadap demokrasi. Pada dasarnya, demokrasi juga menuntut adanya lingkungan yang mendukung, sehingga dengan adanya fenomena ini dapat mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi

(Heriyanto, 2022). Menurut Marcus Meetsner dalam esainya menyatakan bahwa praktik dinasti politik tidak sehat bagi demokrasi karena kontrol pemerintah yang diperlukan oleh demokrasi, seperti check and balances, dapat melemah. Selain itu juga, elit politik yang menguasai daerah dan membentuk dinasti politik yang menggurita seperti dinasti politik Ratu Atut di Banten dapat mempengaruhi berbagai stakeholder pemerintah dalam proses pengambilan keputusan politik sehingga hal ini relatif mudah untuk mendapatkan kekuasaan dan memperebutkan kekuasaan (Mietzner, 2015). Dengan adanya dinasti politik, sulit untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih karena tidak adanya kontrol pemerintah, bahkan cenderung melemah, tidak efektif, dan mengarah pada penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Huntington dan Nelson (1990) di dalam Sukri (2020), partisipasi masyarakat di dalam pemilihan merupakan suatu bentuk ikut sertaan masyarakat secara langsung. Melalui ikut serta yang telah dilakukan, masyarakat dapat memilih pilihan mereka dengan merubah pilihan mereka untuk tidak memilih rezim yang sedang berkuasa. Dalam konteks dinasti politik Atut, partisipasi politik masyarakat Banten dapat dikatakan rendah dan belum mencapai dengan target yang telah ditentukan KPU, dimana partisipasi harus di atas 70%. Dengan partisipasi masyarakat Banten yang rendah di dalam Pilkada, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyalurkan kontribusi politik yang kecil sehingga berpengaruh terhadap pertahanan dan juga berkembangnya dinasti politik keluarga Atut. Meskipun hal ini bukan menjadi faktor dalam rendahnya partisipasi masyarakat Banten, tinggi atau rendahnya partisipasi politik dapat menggambarkan kualitas demokrasi di suatu wilayah. Dalam konteks di Banten, rendahnya partisipasi politik di Banten menunjukkan rendahnya kualitas demokrasi di daerah Banten (Sukri, 2020). Selain itu, rendahnya demokrasi yang ada di Banten juga ditunjukkan dari adanya kekuasaan politik yang dikuasai oleh keluarga Atut pada jabatan-jabatan strategis yang artinya, hal tersebut juga menjadi salah satu alasan sulitnya warga lokal untuk dapat mengikuti kontestasi politik yang ada di daerah Banten. Hal ini terjadi, karena masyarakat biasa yang ingin ikut di dalam kontestasi politik tidak memiliki latar belakang atau pihak-pihak yang membantu mereka dalam maju menjadi kandidat politik. Hal ini sangat disayangkan, karena panggung demokrasi adalah panggung yang luas dan bebas untuk seluruh warga negara, tetapi pada kenyataannya demokrasi di Indonesia mengalami hambatan, salah satunya adalah dinasti politik.

Dinasti politik menyebabkan adanya kecenderungan dalam menghasilkan sistem politik yang lebih bersifat tertutup dan sulit untuk diawasi oleh publik. Dalam dinasti politik, kekuasaan yang bersifat terpusat hanya kepada keluarga tertentu menyebabkan adanya penyalahgunaan dalam kekuasaan yang juga menimbulkan korupsi dan praktik-praktik penyelewengan politik lainnya yang tidak etis. Dengan kurangnya mekanisme yang memadai untuk dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik, hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat di dalam sistem politik dan juga institusi demokrasi (Maslamah & YUSDANI, 2022 di dalam Rusmana, dkk, 2024). Tak

hanya itu saja, dinasti politik juga memberikan implikasi signifikan terhadap partisipasi masyarakat di dalam setiap proses politik. Dalam dinasti politik, disaat keluarga-keluarga politik mendominasi panggung politik, maka masyarakat tidak lagi tergabung dengan kelompok tersebut yang berakhir pada perasaan terpinggirkan atau mengurangi motivasi untuk terlibat di dalam setiap proses politik (Hidayati, 2020 di dalam Rusmana, dkk, 2024). Jika dilihat dari sudut pandang etika politik, dinasti politik mampu menciptakan sejumlah permasalahan kompleks yang meliputi aspek ketidakadilan politik, ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, kekuasaan yang terfokus pada satu kelompok elit yang berdampak pada pengambilan keputusan yang bias dan hanya berfokus pada kepentingan mereka yang menyebabkan termarjinalisasikannya kelompok lain (Maulana & Patrianti, 2023 di dalam Rusmana, dkk, 2024).

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Dinamika politik lokal yang sering terjadi dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi, bahkan dapat membahayakan demokrasi itu sendiri dalam tingkat lokal. Fenomena yang terjadi belakangan ini terkait penerusan kekuasaan kepada anggota keluarga atau disebut sebagai dinasti politik. Dalam dinamika politik lokal, dinasti politik bukanlah hal yang baru sehingga sudah menjadi normalisasi bagi pemegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan mewariskannya kepada sanak dan saudara mereka. Fenomena dinasti politik yang terkenal salah satunya yang dilakukan oleh keluarga Ratu Atut di Provinsi Banten yang sudah dirancang agar setiap anggota keluarga mereka dapat mengikuti kontestasi pemilu dan dapat menduduki jabatan di pemerintahan. Dinasti politik di Banten ini memang sudah ada sejak Chasan Sohib, yang merupakan ayah dari Ratu Atut menjabat dan terus berlanjut dengan diangkatnya Atut menjadi Gubernur di Banten pada 2007-2017. Padahal, Ratu Atut dan adiknya pernah terjerat kasus korupsi dan masyarakat Banten tetap memilih dan ikut melanggengkan dinasti politik yang dibuat oleh keluarga Ratu Atut. Namun faktanya, faktor terus langgengnya dinasti politik di Banten salah satunya keterlibatan masyarakat yang minim di Banten sehingga menggambarkan bahwa masyarakat masih belum peduli terhadap bahaya dinasti politik dalam tingkat lokal. Rendahnya partisipasi masyarakat Banten dapat dipahami sebagai prasyarat maupun konsekuensi dari langgengnya dinasti politik yang terus berkembang di Banten sehingga akan membentuk sebuah siklus yang saling memperkuat dan sulit dipatahkan. Dalam hal ini, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik memungkinkan elit politik dapat mempertahankan kekuasaan mereka tanpa perlawanan. Hal ini menjadi prasyarat untuk kelanggengan dinasti politik di Banten karena lemahnya kontrol publik yang dapat membuka ruang bagi praktik patrimonialisme dan politik balas budi. Selain itu, keberlanjutan kekuasaan dinasti politik turut melemahkan kualitas demokrasi sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik, yang akhirnya dapat memperparah apatisisme politik, di mana menjadikan rendahnya partisipasi sebagai konsekuensi dari sebuah kekuasaan yang terpusat dan tertutup.

Dalam beberapa penelitian menyebutkan kuatnya dinasti politik yang berada di Banten karena peran aktor lokal kuat dan berpengaruh yakni ayah kandung dari Atut yaitu Chasan Sohib. Selain itu, semenjak Atut menjabat sebagai Gubernur Banten, penyebaran politik dinastinya semakin merekah mulai dari ranah eksekutif, legislatif, ormas, pendidikan, sosial-budaya, bahkan bisnis masyarakat Banten. Dalam penelitian lainnya menyebutkan bahwa dinasti politik di Banten menyebabkan dampak terhadap sumber daya alam (SDA) seperti eksploitasi yang masif, pembangunan yang tidak berjalan sempurna, pencemaran lingkungan sampai terhambatnya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dinasti politik di Banten juga merugikan aspek-aspek penting di kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, agar mencegah adanya penguatan praktik dinasti politik pada tingkat lokal, pada konteks ini adalah Banten, pemerintah harus mengambil langkah strategis. Pertama, pemerintah harus melaksanakan peningkatan pendidikan politik untuk masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat menyelenggarakan pelatihan serta diskusi publik secara rutin yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran warga agar lebih peduli terhadap rekam jejak, kapabilitas, dan integritas setiap kandidat yang akan dipilih. Kedua, perlu diadakannya reformasi sistem rekrutmen partai politik secara internal dengan tujuan untuk dapat menciptakan proses seleksi pemimpin yang lebih terbuka, transparan, dan juga berbasis dengan meritokrasi dengan menerapkan uji kelayakan terbuka atau debat publik internal partai. Ketiga, perlu adanya penguatan regulasi hukum untuk membatasi praktik dinasti politik, seperti revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah agar lebih tegas dalam mengatur pencalonan yang dilakukan oleh kerabat petahana dalam periode tertentu. Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut, diharapkan demokrasi lokal dapat menciptakan ruang yang adil, transparan, dan aspiratif untuk publik serta tidak hanya dikuasai oleh segelintir elit saja.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, R. (2011). Praktek Demokrasi Lokal di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Studi Pemerintahan*. 2(2).
- Andriyani, L. (2023). Politik Dinasti atau Dinasti Politik?. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diakses tanggal 16 April 2025 dari <https://umj.ac.id/opini-1/politik-dinasti-atau-dinasti-politik/>
- Anggraini, T. (2018). Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 45-62.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*. 3(2). 77-101.
- BPMBKM. (2023, 3 Agustus). Dampak Politik Dinasti: Keuntungan dan Tantangan bagi Sistem Politik. Diakses tanggal 7 Juni 2025, dari

<https://bpmbkm.uma.ac.id/2023/08/03/dampak-politik-dinasti-keuntungan-dan-tantangan-bagi-sistem-politik/>

- Christiawan, W. (2016). Analisa Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. 14(28), 131-148.
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233-247.
- FH Esa Unggul (2024, 22 Agustus). *Dinasti Politik Fenomena dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia - Fakultas Hukum*. Diakses tanggal 7 Juni 2025, dari <https://fh.esaunggul.ac.id/dinasti-politik-fenomena-dan-dampaknya-terhadap-demokrasi-di-indonesia/>
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1). 91-111.
- Gadafi, K & Nelwati, S. (2024). Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Journal Innovation in Education (INOVED)*. 2(3). 133-148
- Laila, N. Q., & Jubba, H. (2023). Politik Dinasti dan Demokrasi di Aras Lokal. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 9(1), 39-52.
- Maate, S. (2018). Konteks Demokrasi Lokal dan Problematika Otonomi Daerah. *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA*, 3(1).
- Maulidhea, V. (2023). Dinasti Politik Atut dan Implikasinya terhadap Kematangan Demokrasi di Provinsi Banten. Diploma tesis, Universitas Andalas.
- Mietzner, M. (2016). Dynasties and Democracy in Indonesia. *Journal of Democracy*, 27(4), 124–138.
- Nurhadi, W. (2020). Dinasti Politik dalam Demokrasi Lokal Era Desentralisasi. *Magister Ilmu Politik*, FISIP, Universitas Padjadjaran.
- Pradita, R. D., Apasha R., Fatih, M. S., & Wulandari, L. (2025). Dinamika Keterwakilan Politik dalam Politik Dinasti: Studi Kasus Dominasi Elit pada Era Ratu Atut di Banten. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. 7(6), 81-90.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 3(2). 9680-9694
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*. 21(3), 308-315.
- Sisk, T. D. (2001). Democracy At The Local Level: The International IDEA Handbook on Participation, Representation, Conflict Management, and Governance. *International IDEA Handbook Series 4*.
- Sukri, M. A. F. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169-190.

- Sutisna, A. (2017). Gejala proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100-120.
- Umam, F. N. (2020). BAB II Tinjauan Pustaka. Repository Universitas Siliwangi. <http://repositori.unsil.ac.id/4688/4/BAB%20II.pdf>
- Timothy D. Sisk, *Democracy at the Local Level: The International IDEA Handbook on Participation, Representation, Conflict Management and Governance* (Stockholm: International IDEA, 2001).
- Wahyudi, S. S. (2009). *Demokrasi di Tingkat Lokal*. Repository Kemdikbud. [https://repositori.kemdikbud.go.id/1068/1/Demokrasi\\_Lokal-Sarjana.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/1068/1/Demokrasi_Lokal-Sarjana.pdf)
- Rivan, Muhammad Nur. "Ratu Atut Bagian dari Dinasti Politik terhadap Penurunan Demokrasi di Banten," Skripsi, Universitas Nasional, 2024.
- Rusmana, A. R., Abigail, A., Tantiono, I. C., & Vici, V. V. (2024). Kajian Tentang Dinast Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(01), 1-25.